

BAB IV

Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $103^{\circ}40''$ (BT) Bujur Timur sampai $105^{\circ}50''$ (BT) Bujur Timur dan $3^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan sampai $6^{\circ}45''$ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS 2012) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas sumberdaya pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah :

- 1) Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- 2) Sebelah Selatan dengan selat Sunda
- 3) Sebelah Timur dengan laut Jawa

4) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relative luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta Pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (telukbetung), Tarahan dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung dan laut Jawa terdapat pula Pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah Radin Inten II yaitu nama baru dari Branti 28 Km dari ibukota melalui jalan Negara menuju Kotabumi dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

4.2 Kondisi Topografi

Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu:

Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.

- 1) Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 300 meter

sampai 500 meter (dpl). Kawasan ini meliputi wilayah gedung tataan, kedaton, sukoharjo dan pulau panggung di daerah Kabupaten Lampung Selatan serta adirejo dan bangun rejo di daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- 2) Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah timur. Ketinggian kawasan ini berkisar antara 25 hingga 75 meter (dpl) dengan kemiringan 0% hingga 3%.
- 3) Rawa pasang surut di sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter (dpl).
- 4) Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Way Seputih, Way Sekampung, Way Semangka, dan Way Jepara.

4.3 Tutupan Lahan (*Land Coverege*)

Berdasarkan data peta RBI BAKOSURTANAL 2001 dari luas wilayah Provinsi Lampung sebesar 35.288,35 km². Tutupan lahan Provinsi Lampung dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Tutupan Lahan Provinsi Lampung Tahun 2010

No.	Pemanfaatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Permukiman	2.321,83	6.58
2	Sawah	205,5	0.58
3	Pertanian lahan kering	21.492	60.90
4	Perkebunan	1.231,31	3.49
5	Hutan	2.080,26	5.90
6	Rawa, sungai, tubuh air	170,44	0.48
7	Tambak	340,87	0.97
8	Mangrove	4,36	0.01
9	Savana dan semak belukar	4.780,84	13.55
10	Tambang dan tanah terbuka	2.407,09	6.82
11	Penggunaan lainnya	253,83	0.72
Jumlah		35.288,35	100%

4.4 Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung tanggal 17 Juni 1983.

Administrasi Pemerintahan di Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 192,96 Km² terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan;
- 2) Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari 5 (lima) Kecamatan;
- 3) Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa, luas wilayah 3.356,61 Km² terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan;
- 4) Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung, luas wilayah 3.356,61 Km² terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan;
- 5) Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukotanya Kalianda, luas wilayah 2.007,01 Km² terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan;
- 6) Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana, luas wilayah 4.337,63 Km² yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan;

- 7) Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih, luas wilayah 4.789,82 Km² terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kecamatan;
- 8) Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi, luas wilayah 2.725,63 Km² terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan;
- 9) Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu, luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan;
- 10) Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukotanya Menggala, luas wilayah 7.770,84 Km² terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan;
- 11) Kabupaten Pesawaran dengan ibukotanya Gedong Tataan, luas wilayahnya 1,173,77 Km² terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
- 12) Kabupaten Pringsewu dengan ibukotanya Pringsewu, luas wilayah 625,00 Km² terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan;
- 13) Kabupaten Mesuji dengan ibukotanya Mesuji, luas wilayah 2.184,00 Km² terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
- 14) Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayah 1.201,00 Km² terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

4.5 Kependudukan

Berdasarkan data Kependudukan pada tahun 2000 penduduk Provinsi Lampung berjumlah 6.659.869 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk per-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 189 jiwa per Km² tahun 2000 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 74 orang per Km², Kabupaten Tanggamus 239, Kabupaten Lampung Selatan 356, Kabupaten Lampung Timur 200,

Kabupaten Lampung Tengah 218, Kabupaten Lampung Utara 195, Kabupaten Way Kanan 91, Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung 3.851 dan Kota Metro 1.917 orang per Km² .

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP2010) Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 7.608.405 orang dan rata-rata kepadatan penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 216 orang per Km² tahun 2010 berturut-turut adalah Kabupaten Lampung Barat 85 orang, Kabupaten Tanggamus 196 orang, Kabupaten Lampung Selatan 455 orang, Kabupaten Lampung Timur 219 orang, Kabupaten Lampung Tengah 244 orang, Kabupaten Lampung Utara 214 orang, Kabupaten Way Kanan 104 orang, Kabupaten Tulang Bawang 91 orang, Kabupaten Pringsewu 585 orang, Kabupaten Tulang Bawang Barat 209 orang, Kabupaten Mesuji 86 orang, Kota Bandar Lampung 4.570 orang dan Kota Metro 2.354 orang per Km².

Data statistik dari pemekaran Kabupaten ini belum tersedia baik kondisi eksisting maupun data *time series* sehingga dalam melakukan proyeksi penduduk Kabupaten pemekaran tersebut, masih mengikuti data Kabupaten induk. Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2011 mencapai 9.327.445 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 1.444.733 jiwa. Jumlah penduduk perkabupaten selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Lampung Barat	229.881	209.945	439.826
2	Tanggamus	327.985	303.007	630.992
3	Pringsewu	198.434	185.818	384.252
4	Lampung Selatan	553.330	526.461	1.079.791
5	Lampung Timur	539.546	569.469	1.109.015
6	Lampung Tengah	743.773	700.960	1.444.733
7	Lampung Utara	400.665	379.443	780.108
8	Way Kanan	240.634	228.209	468.843
9	Tulang Bawang	209.562	208.089	417.651
10	Tulang Bawang Barat	132.583	135.852	268.435
11	Mesuji	135.213	121.361	256.574
12	Bandar Lampung	703.508	661.251	1.364.759
13	Metro	84.608	81.844	166.452
14	Pesawaran	267.990	248.024	516.014
	Jumlah	4.767.712	4.559.733	9.327.445

(Sumber data BPS)

Pada tahun 2011 kepadatan penduduk di Provinsi Lampung adalah sebesar 216 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 4.570 jiwa/km². Hal ini diakibatkan karena Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang memiliki kelengkapan sarana prasarana dan aksesibilitas wilayah.

Kepadatan penduduk terendah di Provinsi Lampung pada tahun 2011 terdapat di Kabupaten Lampung Barat, Mesuji dan Tulang Bawang yang memiliki kepadatan masing-masing 85,86 dan 91 jiwa/km². Hal ini dipengaruhi oleh medan wilayah yang sulit untuk dijangkau serta ketersediaan prasarana dan sarana masih terbatas, sehingga menurunkan minat penduduk untuk menetap dan mencari penghidupan disana.

Tabel 3 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas wilayah	Tahun 2011	
				Jumlah	Kepadatan
1	Lampung Barat	Liwa	4.950.40	439.826	85.05
2	Tanggamus	Kota Agung	3.356.61	630.992	196.26
3	Pringsewu	Pringsewu	625.00	384.252	585.00
4	Lampung Selatan	Kalianda	2.007.01	1.079.791	455.89
5	Lampung Timur	Sukadana	4.337.89	1.109.015	219.94
6	Lampung Tengah	Gunung sugih	4.789.82	1.444.733	244.23
7	Lampung Utara	Kotabumi	2.725.63	780.108	214.31
8	Way Kanan	Blambangan umpu	3.921.63	468.843	104.50
9	Tulang Bawang	Menggala	7.770.84	417.651	91.64
10	Tuba Barat	Panaragan	1.201,00	268.435	209.00
11	Mesuji	Mesuji	2.184,00	256.574	86.00
12	Bandar Lampung	Bandar Lampung	192.96	1.364.759	4.570.82
13	Metro	Metro	61.79	166.452	2.354.98
14	Pesawaran	Gedung Tataan	1.173.77	516.014	356.34
Jumlah			35.288.35	9.327.445	216.342

Sumber data Lampung dalam Angka

4.6 Latar Belakang Konflik

4.6.1 Pengertian konflik

Konflik merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dinamis. Konflik terjadi karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya. Dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat Konflik bisa dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar, nasional dan global.

Menurut beberapa peneliti pengertian dapat didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan. Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai 'perang dingin' antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah.
- 2) Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif. Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak-pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali.

Konflik di Indonesia dapat diidentifikasi secara umum atas dua jenis yaitu:

- 1) Konflik vertikal yaitu konflik Negara versus warga, buruh versus perusahaan;
- 2) Konflik horizontal yaitu konflik antar suku, antar agama dan antar masyarakat. Konflik-konflik tersebut bisa berlatar belakang ekonomi, politik, agama, kekuasaan dan kepentingan lainnya.

4.6.2 Akar Konflik Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang bergaul dan berinteraksi secara intensif dan tidak dapat terhindar dari konflik sosial masyarakat. Masyarakat sebenarnya sebuah proses tiada henti. Manusia tidak berada di dalam masyarakat bukan bagai burung di dalam kurungannya, melainkan ia bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat bekerjasama dengan orang lain, baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain, untuk terciptanya kehidupan yang aman dan damai.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia perlu melakukan interaksi sosial berupa hubungan timbal balik antar individu dengan individu lainnya, antar kelompok dengan kelompok dan antar individu dengan kelompok yang terdapat dalam masyarakatnya.

Konflik merupakan sebuah peristiwa perbedaan cara pandang yang dapat mengarah pada bentrok fisik. Sudah terbukti, konflik sosial semisal perang antarsuku, perang antarkampung, perang antarsaudara bahkan tawuran antar pelajar bermula dari konflik yang absurd dan abstrak atau sesuatu yang sifatnya sepele diantaranya:

a. Bidang ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya konflik dapat dilihat dari sisi bidang ekonomi pengaruh munculnya potensi konflik di masyarakat sangat dominan. Faktor ini menjadi yang paling rentan akan gesekan-gesekan sehingga memicu kesalahpahaman diantara kelompok masyarakat.

Tabel 4 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

No.	Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Pddk Miskin %
1	2	3	4	5
1	2006	144.934	1.638,00	22,77
2	2007	157.052	1.661,70	22,19
3	2008	172.332	1.591,58	20,98
4	2009	188.812	1.558,28	20,22
5	2010	202.414	1.479,93	18,94
6	2011	234.073	1.298,71	16,93

Sumber data BPS

Terlihat dalam tabel 4 bahwa selama tahun 2006 s/d 2011 jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan, dari sekitar 1.638.000 jiwa (2006), menjadi sekitar 1.298.710 jiwa (2011).

b. Bidang kebudayaan

Kemudian pada sisi kehidupan budaya pada masyarakat, bahwa di Provinsi Lampung sudah begitu membaaur dengan budaya masyarakat suku lainnya, hal tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat Provinsi Lampung dapat menerima pembauran yang ada dan, sebahagian besar adat budaya ada di Provinsi Lampung.

Masyarakat Lampung memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai

tempat di daerah Lampung. Namun secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu masyarakat adat Saibatin yang berkediaman di sepanjang pesisir pantai dan masyarakat adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung.

Keaslian budaya masyarakat Lampung memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi :

- 1) *Pi'il Pesenggiri* diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara kelompok yang senantiasa dipertahankan.
- 2) *Sakai Sambayan* merupakan pengertian yang luas termasuk didalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu membahu dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi orang lain.
- 3) *Nemui Nyimah* berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka.
- 4) *Negah Nyappur* adalah sebagai tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas.
- 5) *Bejuluk Beadek* adalah prosesi/ritual adat istiadat dalam rangka memberikan gelar adat.

c. Bidang keagamaan

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat. Dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, diantaranya perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama dan masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.

d. Bidang politik

Ketika kemerdekaan sudah dicapai dan sampailah kita untuk menata kekuasaan negara, maka kita pun segera berhadapan dengan usaha membagi-bagi kekuasaan pemerintahan, dan kepentingan membagi kekuasaan ternyata mempunyai kaitan dengan akar-akar konflik yang berbasis pada faham kedaerahan dan keagamaan, sehingga muncullah konflik politik kekuasaan yang berbasis fanatisme ras, suku dan keagamaan. Konflik politik kekuasaan yang mencerminkan ketidak-adilan membuat persatuan bangsa terguncang-guncang, terluka, terkoyak, dan sering kali memperlemah rasa persatuan dan solidaritas kebangsaan.

Ada sejumlah pola konflik yang perlu diwaspadakan akhir-akhir ini antara lain:

- 1) Konflik internal dalam suatu masyarakat lokal;
- 2) Konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah;
- 3) Konflik masyarakat antar daerah;

- 4) Konflik antar dua atau lebih pemerintah daerah;
- 5) Konflik antar masyarakat lokal dan pemerintah pusat sebagai penyelenggara Negara;
- 6) Konflik antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat
- 7) Konflik antar elit di pemerintah pusat yang berimbas pada konflik masyarakat di tingkat lokal.

Konflik yang terjadi pada umumnya melalui dua tahap yang dimulai dari tahap disorganisasi atau keretakan dan terus berlanjut ke tahap disintegrasi atau perpecahan. Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketidaktepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.
- b. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
- c. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
- d. Sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen dan cenderung dilakukan pembiaran.
- e. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, terjadinya konflik disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
- b. Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok disebabkan perbedaan latar belakang budaya.
- c. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan diantara individu atau kelompok.
- d. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau system yang laku dalam masyarakat.